

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan publik, karena implementasi kebijakan publik adalah suatu proses pelaksanaan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari Kab/Kota kepada Provinsi di Kota Bekasi sudah dapat dikatakan *ter-implementasikan* dengan cukup baik. Keberhasilan tersebut dianalisis berdasarkan aspek: *idealized policy*, *target group*, *implementing organization* dan *environmental factors*.

1. *Idealized policy*

Dasar dari kebijakan ini ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam penelitian ini berfokus pada terjadinya pengalihan pengelolaan pendidikan menengah yang sebelumnya di kelola oleh kab/kota kepada provinsi. Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu meskipun terdapat kendala dalam masalah pendanaan pendidikan namun masalah tersebut dapat disiasati dengan adanya beberapa program yang diberikan baik oleh pemerintah maupun pihak sekolah dengan tujuan untuk meringankan beban orangtua/wali murid.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

a. *Target Group*

Dalam kebijakan pengalihan pendidikan menengah ini, yang termasuk dalam *target group* atau kelompok sasaran ialah SMA dan SMK yang terdapat di Kota Bekasi. Dan berdasarkan analisis dari derajat kelembagaan yang ada, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan dibantu oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III merupakan pelaksana kebijakan. Dimana seluruh pengelolaan berada di Dinas Pendidikan Provinsi, namun dikarenakan adanya rentang kendali yang cukup jauh maka sebagian dari kewenangan tersebut di bantu oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III.

b. *Implementing Organization*

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III baru dibentuk ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini diresmikan. Karena Cabang Dinas ini merupakan organisasi yang baru dibentuk, tentu saja terdapat perubahan dalam hal struktur organisasi dan personil yang ada. Pada saat dikeluarkannya Undang-Undang ini, para pelaksana kebijakan dengan sangat aktif mensosialisasikan kebijakan ini kepada para kelompok sasaran. Serta dengan adanya Cabang Dinas Pendidikan, mendapatkan respon positif dari para kelompok sasaran karena dirasa sangat membantu mereka dalam pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang jaraknya cukup jauh.

c. *Environmental Farctors*

Terdapat perbedaan sumber maupun jumlah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah sejak diberlakukannya pengalihan kebijakan menengah dari kab/kota kepada provinsi di Kota Bekasi, baik itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah. Yang kemudia hal tersebut disiasati dengan penarikan sumbangan biaya pendidikan.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti sampaikan diatas, maka dapat ditemukan implikasi sebagai berikut:

1. Terdapat rentang kendali yang jauh dari Dinas Pendidikan Provinsi kepada masing-masing SMA/SMK yang ada di Kota Bekasi sehingga diperlukan adanya Cabang Dinas Pendidikan yang berada dekat dengan wilayah tersebut.
2. Perlunya pengoptimalan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan agar implementasi kebijakan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dapat berjalan dengan baik.
3. Adanya penarikan sumbangan pembiayaan pendidikan dikarenakan perbedaan jumlah bantuan yang diterima oleh sekolah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.